

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II
PANGKALPINANG**



Jalan Yos Sudarso No.133, Lontong Pancur, Pangkal Balam
Pangkalpinang Prop. Bangka Belitung 33115 Telp/Fax : (0717) 422213
Website : <http://www.bkp-pangkalpinang.deptan.go.id>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Yulianto Setiawan
NIP. 196107171991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

1

I Laporan Realisasi Anggaran

1

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Tanah

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.4 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.3 Aset Lainnya
 - C.3.1 Aset Tak Berwujud
 - C.3.2 Aset Lain-lain
 - C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.4.2 Uang Muka dari KPPN
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Yulianto Setiawan
NIP. 196107171991031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp549.513.830,00 atau mencapai 157,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp349.999.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp3.307.739.802,00 atau mencapai 47,16% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.013.565.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2017.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.826.834.320,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp330.447.035,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.492.565.410,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.821.875,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp11.726.834.320,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp536.247.545,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.282.719.232,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-2.746.471.687,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp11.859.897,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-2.734.611.790,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp11.696.595.138,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-2.734.611.790,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.764.850.972,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp11.726.834.320,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2017 dan 30 JUNI 2016**

Uraian	Catatan	30 Juni 2017			30 Juni 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	349.999.000,00	549.513.830,00	157,00	289.426.141,00
Jumlah Pendapatan		349.999.000,00	549.513.830,00	157,00	289.426.141,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2.538.655.000,00	1.380.035.653,00	54,36	1.501.290.463,00
Belanja Barang	B.3	3.474.282.000,00	1.667.588.149,00	48,00	1.506.533.951,00
Belanja Modal	B.4	1.000.628.000,00	260.116.000,00	26,00	672.745.600,00
Jumlah Belanja		7.013.565.000,00	3.307.739.802,00	47,16	3.680.570.014,00

II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	100.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0,00	1.316.285,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	0,00	2.048.610,00
Persediaan	C.1.4	230.447.035,00	82.290.870,00
Jumlah Aset Lancar		330.447.035,00	85.655.765,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	3.429.738.420,00	3.429.738.420,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.368.910.013,00	5.210.283.415,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	7.410.971.463,00	7.410.971.463,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	173.053.000,00	173.053.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	236.000.000,00	236.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	9.856.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-3.830.471.645,00	-3.627.978.818,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-1.281.291.640,00	-1.189.331.547,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-24.200.201,00	-21.552.717,00
Jumlah Aset Tetap		11.492.565.410,00	11.621.183.216,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	91.525.000,00	384.538.428,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-91.525.000,00	-383.624.428,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-2.293.125,00	-1.528.750,00
Jumlah Aset Lainnya		3.821.875,00	5.500.250,00
Jumlah Aset		11.826.834.320,00	11.712.339.231,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	0,00	15.744.093,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	100.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		100.000.000,00	15.744.093,00
Jumlah Kewajiban		100.000.000,00	15.744.093,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	11.726.834.320,00	11.696.595.138,00
Jumlah Ekuitas		11.726.834.320,00	11.696.595.138,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		11.826.834.320,00	11.712.339.231,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 dan 30 JUNI 2016**

Uraian	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	536.247.545,00	281.591.141,00
JUMLAH PENDAPATAN		536.247.545,00	281.591.141,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.379.555.653,00	1.492.094.685,00
Beban Persediaan	D.3	128.357.201,00	94.126.752,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	671.960.456,00	660.717.605,00
Beban Pemeliharaan	D.5	272.532.539,00	157.512.717,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	440.815.202,00	539.066.483,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	389.498.181,00	354.127.290,00
JUMLAH BEBAN		3.282.622.395,00	3.297.645.532,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-2.746.374.850,00	-3.016.054.391,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	11.950.000,00	3.765.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	914.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2.994.011,00	5.464.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2.170.114,00	3.536.658,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.859.897,00	5.692.342,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-2.734.611.790,00	-3.010.362.049,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 dan 30 JUNI 2016**

Uraian	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
EKUITAS AWAL	E.1	11.696.595.138,00	10.294.246.123,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-2.734.611.790,00	-3.010.362.049,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.764.850.972,00	3.399.470.873,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		30.239.182,00	389.108.824,00
EKUITAS AKHIR		11.726.834.320,00	10.683.354.947,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

- **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Comment [c1]: Tambahan sesuai PER 42 2014

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, Mendukung terwujudnya keamanan pangan dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan usaha pencegahan masuknya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dari luar negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia khususnya ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya;

- b. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantina nasional secara komprehensif,
- c. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas perdagangan komoditi pertanian,
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantina.
- f. Mendukung Upaya khusus peningkatan ketahanan pangan

Melalui peranan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantina diharapkan Penyelenggaraan karantina pertanian yang pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dapat terwujud atau mampu menghadapi serangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkomitmen dengan visi "Menjadi Instansi Pelayanan yang terbaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017".

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Landasan Yuridis yang dimaksud adalah :
Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
- 2) Lingkungan strategis
Perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas SDM birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dituntut untuk tidak diskriminatif serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik.
- 3) Arah Kebijakan Pembangunan Perkarantina
Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan arah kebijakan pembangunan perkarantina Barantan, sebagaimana

ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2010 – 2017, Visi Badan Karantina Pertanian adalah “ Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya, dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi.

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya.
- Mendukung terwujudnya ketahanan dan keamanan pangan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

- a) Penguatan kelembagaan

Program kerja Penguatan Kelembagaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah berupa output terlaksananya pembangunan Kantor-kantor Wilker beserta Instalasi Karantinanya serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya khususnya untuk penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dan berkompeten guna mendukung efektifitas pencegahan dan pengendalian OPT/OPTK dan HPH/HPHK.

- b) Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai .
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.
 - b. Melatih dan meningkatkan pengetahuan petugas karantina hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan workshop maupun pelatihan teknis.
 - c. Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain.
 - d. Membekali buku saku tentang prosedur kerja 8P bagi para petugas POPT dan MV serta PMV dalam tugas perkarantinaan pertanian maupun dalam melakukan pengawasan lalu lintas hayati.
 - e. Melatih dan membekali pengetahuan kepada para petugas POPT dan MV serta PMV tentang teknik/tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati.
- c) Pengembangan Kerjasama dengan instansi terkait dan Public Awareness
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Berpartisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, baik tingkat nasional maupun daerah,
 - b. Koordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan instansi terkait dengan system CIQ, dalam rangka pelaksanaan operasional,
 - c. Mengadakan sosialisasi perkarantinaan kepada masyarakat dan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan, perusahaan ekspor/impor dan instansi lainnya melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Pertanian.
 - d. Koordinasi dengan Administrator Pelabuhan dan Administrator Bandar Udara, serta Kantor Pos dalam rangka kegiatan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran,

- e. Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dibidang karantina pertanian,
 - f. Koordinasi dengan asosiasi perusahaan pengendali OPT dalam rangka pelaksanaan skim audit fumigasi dan asosiasi lainnya.
- d) Peningkatan penerapan Peraturan Perundangan dan Sistem Perkarantinaan, dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri, Juklak/Juknis, dan Manual). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian,
 - b. Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang – undangan karantina pertanian,
 - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan/regulasi karantina pertanian,
- e) Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi.
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data informasi publikasi dan dokumentasi,
 - b. Mengadakan bahan informasi dan publikasi, antara lain menerbitkan brosur, leaflet, film, dan buku tentang karantina pertanian.
 - c. Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer,
 - d. Menerapkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
 - e. Pengadaan bahan komputer dan perlengkapan lainnya,
 - f. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu.
- f) Pengembangan Infrastruktur. Sarana dan Prasarana yang optimal serta teknologi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Melengkapi sarana, peralatan, dan bahan operasional/pemeriksaan media pembawa OPTK dan HPHK di lapangan,
 - b. Melengkapi peralatan dan bahan laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya yang berkaitan dengan identifikasi OPTK/HPHK, teknis dan metode pengujian yang tepat dan akurat.
 - c. Melengkapi bahan dan peralatan perlakuan karantina pertanian,

- d. Pemeliharaan gedung kantor dan instalansi karantina lainnya,
 - e. Pengadaan kendaraan operasional roda-2
 - f. Pemeliharaan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda-4 dan roda-2,
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan alat pengolahan data
 - h. Pengadaan dokumen operasional karantina yang tidak disediakan oleh Barantan.
- g) Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Satker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	248.000,00	248.000,00
Pendapatan Jasa	349.751.000,00	349.751.000,00
Jumlah Pendapatan	349.999.000,00	349.999.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.538.655.000,00	2.538.655.000,00
Belanja Barang	3.454.282.000,00	3.474.282.000,00
Belanja Modal	1.000.628.000,00	1.000.628.000,00
Jumlah Belanja	6.993.565.000,00	7.013.565.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp549.513.830,00 atau mencapai 157,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp349.999.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	248.000,00	11.950.000,00	4.818,55
Pendapatan Jasa	349.751.000,00	537.563.830,00	153,70
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	349.999.000,00	549.513.830,00	157,00

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 89,86% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.950.000,00	3.765.000,00	217,40
Pendapatan Jasa	537.563.830,00	281.641.141,00	90,87
Pendapatan Lain-lain	0,00	4.020.000,00	-100,00
Jumlah	549.513.830,00	289.426.141,00	89,86

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp3.307.739.802,00 atau 47,16% dari anggaran belanja sebesar Rp7.013.565.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2.538.655.000,00	1.380.215.653,00	54,37
Belanja Barang	3.474.282.000,00	1.667.588.149,00	48,00
Belanja Modal	1.000.628.000,00	260.116.000,00	26,00
Total Belanja Kotor	7.013.565.000,00	3.307.919.802,00	47,17
Pengembalian Belanja		-180.000,00	0,00
Total Belanja	7.013.565.000,00	3.307.739.802,00	47,16

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -10,13% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Pegawai dikarenakan banyaknya pegawai kantor yang melakukan perjalanan dinas sehingga belum maksimal nya pencairan belanja pegawai.
2. Peningkatan Belanja Barang untuk meningkatkan kegiatan operasional perkantoran guna memberikan pelayanan secara efisien dan efektif.
3. Belum terserapnya Belanja Modal dikarenakan masih dalam proses pengerjaan bangunan kantor balai.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	.%
Belanja Pegawai	1.380.035.653,00	1.501.290.463,00	-8,08
Belanja Barang	1.667.588.149,00	1.506.533.951,00	10,69
Belanja Modal	260.116.000,00	672.745.600,00	-61,34
Total Belanja	3.307.739.802,00	3.680.570.014,00	-10,13

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.380.035.653,00 dan Rp1.501.290.463,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -8,08% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perubahan tarif tunjangan fungsional veteriner dan POPT.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat sebanyak 5 pegawai
3. Adanya pegawai yang kenaikan gaji berkala sebanyak 19 pegawai
4. Adanya penambahan tanggungan anggota keluarga baik menambah anak

**Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.292.727.653,00	1.431.787.805,00	-9,71
Belanja Lembur	87.488.000,00	70.238.000,00	24,56
Jumlah Belanja Kotor	1.380.215.653,00	1.502.025.805,00	-8,11
Pengembalian Belanja Pegawai	-180.000,00	-735.342,00	-75,52
Jumlah Belanja	1.380.035.653,00	1.501.290.463,00	-8,08

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.667.588.149,00 dan Rp1.506.533.951,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 10,69% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya Belanja Barang tahun 2017 dikarenakan untuk menunjang kegiatan Operasional Perkantoran sehingga bisa berjalan secara maksimal dan efektif.
2. Adanya Belanja Barang Persediaan untuk meningkatkan SDM yang memadai dalam memberikan pelayanan yang optimal.
3. Serta meningkatnya Belanja Pemeliharaan untuk mendukung kegiatan Operasional yang mampu memberikan Output yang efektif dan efisien.

**Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	487.727.710,00	387.159.612,00	25,98
Belanja Barang Non Operasional	75.637.805,00	177.706.871,00	-57,44
Belanja Barang Persediaan	269.064.469,00	146.792.900,00	83,30
Belanja Jasa	121.810.424,00	106.094.608,00	14,81
Belanja Pemeliharaan	272.532.539,00	149.713.477,00	82,04
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	440.815.202,00	539.066.483,00	-18,23
Jumlah Belanja Kotor	1.667.588.149,00	1.506.533.951,00	10,69
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.667.588.149,00	1.506.533.951,00	10,69

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp260.116.000,00 dan Rp672.745.600,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar -61,34% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kantor Balai Baru merealisasikan Belanja Modal Peralatan Mesin guna mendukung kegiatan Operasional dan pelayanan prima.
2. Menurunnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan belum terealisasinya Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung

**Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	67.218.600,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.260.000,00	416.050.000,00	-39,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.856.000,00	189.477.000,00	-94,80
Jumlah Belanja Kotor	260.116.000,00	672.745.600,00	-61,34
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	260.116.000,00	672.745.600,00	-61,34

B.4.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp250.260.000,00 dan Rp416.050.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -39,85% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh belanja modal peralatan mesin yang sesuai dengan kebutuhan operasional kantor yang sudah dianggarkan tahun 2017 untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan perkantoran.

**Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.260.000,00	416.050.000,00	-39,85
Jumlah Belanja Kotor	250.260.000,00	416.050.000,00	-39,85
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	250.260.000,00	416.050.000,00	-39,85

B.4.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.856.000,00 dan Rp189.477.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -94,80% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh Karena Kantor Balai baru merealisasikan Jasa Konsultasi Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung

**Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.856.000,00	189.477.000,00	-94,80
Jumlah Belanja Kotor	9.856.000,00	189.477.000,00	-94,80
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	9.856.000,00	189.477.000,00	-94,80

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Rekening Bank	100.000.000,00	0,00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.316.285,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Uang Tunai	0.00	1.316.285,00
Bank	0.00	0.00
dst...	0.00	0.00
Jumlah	0.00	1.316.285,00

C.1.3 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.048.610,00.

**Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Sewa Tanah Pelindo	0.00	2.048.610,00
Penjelasan 2	0.00	0.00
dst...	0.00	0.00
Jumlah	0.00	2.048.610,00

C.1.4 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp230.447.035,00 dan Rp82.290.870,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Persediaan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	230.447.035,00	82.290.870,00
Jumlah	230.447.035,00	82.290.870,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.429.738.420,00 dan Rp3.429.738.420,00.

Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	699,00m2	YOS SUDARSO Rt.01, PANGKALBALAM	253.475.000,00
2.	1.160,00m2	VETERAN NO 6 TANJUNG PANDAN Rt.005/002, TANJUNG PANDAN	278.400.000,00
3.	1.700,00m2	Tanjung kalian Rt.04/10, Muntok	250.000.000,00
4.	1.596,00m2	Sungai Selan Rt.01/01, Sungai Selan	138.000.000,00
5.	356,00m2	YOS SUDARSO Rt.01/1, PANGKALBALAM	1.450.000.000,00

No	Luas	Lokasi	Nilai
6.	1.151,00m2	BANDARA BULUH TUMBANG Rt.-, TANJUNG PANDAN	124.900.000,00
7.	1.179,00m2	MODONG. PEL.LAUT MANGGAR Rt.002/003, MANGGAR	70.000.000,00
8.	3.406,00m2	MANGGAR Rt.08/04, Tanjung Pandan	149.864.000,00
9.	1.354,00m2	KOMALA Rt., PANGKALBALAM	513.422.000,00
10.	1.189,00m2	Tanjung Kalian Rt.04/110, MUNTOK	100.000.000,00
11.	394,00m2	DESA DUL Rt., PANGKALAN BARU	101.677.420,00
Jumlah			3.429.738.420,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.368.910.013,00 dan Rp5.210.283.415,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	5.210.283.415,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	250.260.000,00
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-91.633.402,00
Saldo per 30 Juni 2017	5.368.910.013,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	-3.830.471.645,00
Nilai Buku per 30 Juni 2017	1.538.438.368,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan dari pembelian 48 unit senilai Rp.250.260.000,- yang terdiri dari :

1	AC	sebanyak	8 Unit	senilai Rp.	40.000.000	-
2	Televisi	sebanyak	2 Unit	senilai Rp.	12.000.000	-
3	P.C Unit dan Printer	sebanyak	7 Unit	senilai Rp.	69.340.000	-
4	Meubelair	sebanyak	31 Unit	senilai Rp.	128.920.000	-

2. Adanya Penghentian Aset dari Penggunaannya berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2.
3. Pengurangan dari terjadi dari Akumulasi penyusutan aset sebesar Rp.- 3.830.471.645,- sedang untuk Nilai dan Perhitungan penyusutan dan

akumulasinya aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran A1** Laporan Keuangan ini.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.410.971.463,00 dan Rp7.410.971.463,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp173.053.000,00 dan Rp173.053.000,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp236.000.000,00 dan Rp236.000.000,00.

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.856.000,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-5.135.963.486,00 dan Rp-4.838.863.082,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	5.368.910.013,00	-3.830.471.645,00	1.538.438.368,00
2.	Gedung dan Bangunan	7.410.971.463,00	-1.281.291.640,00	6.129.679.823,00

3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.053.000,00	-24.200.201,00	148.852.799,00
4.	Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		13.188.934.476,00	-5.135.963.486,00	8.052.970.990,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp91.525.000,00 dan Rp384.538.428,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	384.538.428,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	91.633.402,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-384.646.830,00
Saldo per 30 Juni 2017	91.525.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	-91.525.000,00
Nilai Buku per 30 Juni 2017	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Adanya penambahan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional kantor yaitu berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 Rp. 76.573.000,- dan 1 unit Kendaraan Roda 2 Rp.14.952.000,-.

- Adanya Penghapusan (BMN yang Dihentikan) penggunaannya dikarenakan rusak berat senilai Rp.-384.646.830,-.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-93.818.125,00 dan Rp-385.153.178,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-2.293.125,00	3.821.875,00
2.	Aset Lain-lain	91.525.000,00	-91.525.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		97.640.000,00	-93.818.125,00	3.821.875,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.744.093,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	480.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	15.264.093,00
Jumlah	0,00	15.744.093,00

C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.051.189.505,00 dan Rp10.051.189.505,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp536.247.545,00 dan Rp281.591.141,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	536.247.545,00	281.591.141,00	90,44
Jumlah	536.247.545,00	281.591.141,00	90,44

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2017 dan 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada Semester I TA 2017 mengalami peningkatan sebesar 90,44 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP Semester I TA 2016.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.379.555.653,00 dan Rp1.492.094.685,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	915.730.500,00	993.497.042,00	-7,83
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.471,00	16.228,00	-16,99
Beban Tunj. Anak PNS	19.578.322,00	21.729.920,00	-9,90
Beban Tunj. Beras PNS	58.515.360,00	58.442.940,00	0,12
Beban Tunj. Fungsional PNS	83.880.000,00	104.010.000,00	-19,35
Beban Tunj. PPh PNS	26.800,00	12.010.661,00	-99,78
Beban Tunj. Struktural PNS	14.700.000,00	17.150.000,00	-14,29

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63.007.200,00	70.716.894,00	-10,90
Beban Tunjangan Umum PNS	17.280.000,00	20.855.000,00	-17,14
Beban Uang Lembur	87.488.000,00	70.238.000,00	24,56
Beban Uang Makan PNS	119.336.000,00	123.428.000,00	-3,32
Jumlah	1.379.555.653,00	1.492.094.685,00	-7,54

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.379.555.653,- dan Rp 1.492.094.685,-. Berdasarkan Tabel diatas, realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar kenaikan 7,54 persen dari realisasi belanja TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Untuk Menjaga Prov.Kepulauan Bangka Belitung, Pegawai BKP Kelas II Pangkalpinang dituntut untuk melindungi komoditas pertanian dari ancaman HPHK dan OPTK sehingga dilakukan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp128.260.364,00 dan Rp94.126.752,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	0,00	7.249.000,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	128.260.364,00	84.979.752,00	50,93
Beban persediaan lainnya	0,00	1.898.000,00	-100,00
Jumlah	128.260.364,00	94.126.752,00	36,26

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Beban Persediaan tersebut merupakan barang barang yang habis pakai terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran yang efektif dan efisien

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp671.960.456,00 dan Rp660.717.605,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	62.637.805,00	170.806.871,00	-63,33
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.500.000,00	6.000.000,00	-58,33
Beban Barang Operasional Lainnya	70.022.232,00	30.754.452,00	127,68
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	75.300.000,00	59.800.000,00	25,92
Beban Honor Output Kegiatan	10.500.000,00	900.000,00	1.066,67
Beban Jasa Profesi	25.750.000,00	10.470.000,00	145,94
Beban Keperluan Perkantoran	283.733.625,00	251.391.229,00	12,87
Beban Langganan Air	4.099.500,00	4.808.950,00	-14,75
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	740.000,00	640.000,00	15,63
Beban Langganan Listrik	55.681.783,00	47.448.141,00	17,35
Beban Langganan Telepon	16.975.048,00	21.156.766,00	-19,77
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	53.803.501,00	36.213.931,00	48,57
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.868.352,00	9.000.000,00	-45,91
Beban Sewa	5.348.610,00	11.327.265,00	-52,78
Jumlah	671.960.456,00	660.717.605,00	1,70

Berdasarkan tabel diatas, Beban barang dan jasa merupakan penyelenggaraan kegiatan operasional untuk mendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada publik/pengguna jasa semaksimal dan seefisien sesuai dengan SOP.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp272.532.539,00 dan Rp157.512.717,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.163.000,00	25.000.000,00	460,65
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.832.500,00	2.862.244,00	103,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.537.039,00	121.851.233,00	3,85
Beban Persediaan suku cadang	0,00	7.799.240,00	-100,00
Jumlah	272.532.539,00	157.512.717,00	73,02

Berdasarkan tabel diatas, beban pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perkantoran sebagai langkah strategis untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu dan handal dalam rencana kegiatan operasional kantor.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp440.815.202,00 dan Rp539.066.483,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016**

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	153.664.293,00	78.767.604,00	95,09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.470.000,00	140.400.000,00	-84,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	3.680.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124.858.909,00	148.426.879,00	-15,88
Beban Perjalanan Tetap	139.822.000,00	167.792.000,00	-16,67
Jumlah	440.815.202,00	539.066.483,00	-18,23

Berdasarkan tabel diatas, Beban perjalanan dinas merupakan beban yg diperuntukan untuk pegawai mengelola anggaran yg diberikan untuk membina pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp389.498.181,00 dan Rp354.127.290,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	764.375,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	91.960.093,00	85.942.728,00	7,00
Beban Penyusutan Irigasi	393.527,00	398.698,00	-1,30
Beban Penyusutan Jaringan	2.253.957,00	2.150.833,00	4,80
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	455.143,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	294.126.229,00	265.179.888,00	10,92
Jumlah	389.498.181,00	354.127.290,00	9,99

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-914.000,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-236.700,00	-3.536.658,00	-93,31
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-1.933.414,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.040.424,00	1.444.000,00	110,56

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11.950.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	3.765.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	4.020.000,00	-100,00
Jumlah	11.906.310,00	5.692.342,00	109,16

Berdasarkan tabel diatas, ini merupakan pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp. 3.040.424,- dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp.11.950.000,-.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.696.595.138,00 dan Rp10.294.246.123,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp-2.734.071.790,00 dan Rp-2.993.045.666,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.764.707.722,00 dan Rp3.399.470.873,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.307.739.802,00
Diterima dari Entitas Lain	-549.513.830,00
Transfer Masuk	6.481.750,00
Jumlah	2.764.707.722,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-549.513.830,00 sedangkan DKEL sebesar Rp3.307.739.802,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp6.481.750,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp6.481.750,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 30 Juni 2017

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi		6.481.750,00
Jumlah			6.481.750,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.726.834.320,00 dan Rp10.683.354.947,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Di akhir tahun 2016 sewa tanah dari PELINDO Cabang Pangkalpinang pada Balai karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang terdapat Belanja dibayar di muka untuk periode per tanggal 1 januari sd 31 desember 2017 sebesar Rp.2.048.610,-
- b. Di pertengahan tahun dilakukan proses Rekonsiliasi dari bulan Januari sd Mei 2017 dengan KPPN Pangkalpinang sehingga masih terdapat selisih PNBPN dari bulan yang bersangkutan.
- c. Diakhir Bulan Juni terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Tanah seluas 3,406 m2 yang terletak di Jalan Jl Manggar Desa Buluh Tumbang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung yang merupakan Tanah ex wilker Karantina Hewan Palembang sedang dalam sengketa karena adanya kepemilikan ganda dengan pihak TNI AU Pangkalan Tanjung Pandan, dalam proses penyelesaiannya sudah di lakukan pertemuan dengan pihak –pihak terkait seperti penyediaan barang, kepala desa, pihak AU sendiri, BPN baik dengan BKP Kelas II Pangkalpinang maupun dengan Tim dari Badan Karantina Pertanian, yang terakhir pertemuan dengan Irjen dengan pihak TNI AU juga belum ada hasilnya juga masih menunggu kebijakan dari pihak kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Dan terakhir Proses penyelesaian sudah ada titik temu dengan Pihak AURI sehingga dari pihak BPN Tanjung pandan sudah mau melakukan proses pembuatan Sertifikat tanah yang bersangkutan.
- b. Pada Tahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 1 kali hal ini dikarenakan adanya penambahan Pagu DIPA dari Kantor Pusat sehingga berubahnya DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- c. Ditahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan inventarissasi aset rusak berat sehingga dilakukan proses lelang berdasarkan surat permohonan lelang Nomor:748/PL.320/K.30.C/5/2017 tanggal 30 Mei 2017 serta Salinan Risalah Lelang nomor:384/2017 untuk dilaksanakan proses lelang dengan perantara KPKNL Pangkalpinang berupa Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit.

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017

d. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: drh. Yulianto Setiawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: drh. Herwintarti
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Sunarto, SE
Bendahara	: Agus Giarto, SP

LAMPIRAN 1.

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG							
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap							
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017							
NO	ASET TETAP	MASA MANFAAT	NILAI PEROLEHAN	Akum.Peny sd periode ini	Beban Penyusutan periode ini	TOT.AKUM PENYUSUTAN sd periode ini	NILAI BUKU
A	PERALATAN DAN MESIN		5.379.508.763	3.638.485.068	294.418.729	3.841.070.395	1.538.438.368
1	ALAT BANTU	0	7.650.099	7.650.099	-	7.650.099	-
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	871.900.366	666.554.652	37.197.674	612.227.326	259.673.040
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	910.000	910.000	-	910.000	-
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	15.842.000	15.842.000	-	15.842.000	-
5	ALAT UKUR	3	13.963.000	9.163.000	1.200.000	10.363.000	3.600.000
6	ALAT PENGOLAHAN	0	150.475.038	150.475.038	-	150.475.038	-
7	ALAT KANTOR	10	401.812.984	222.461.886	33.223.400	255.576.884	146.236.100
8	ALAT RUMAH TANGGA	12	751.650.610	410.843.810	55.023.600	465.667.410	285.983.200
9	ALAT STUDIO	4	64.693.852	58.611.813	1.596.346	60.208.159	4.485.693
10	ALAT KOMUNIKASI	2	25.728.425	23.168.425	320.000	23.488.425	2.240.000
11	ALAT KEDOKTERAN	4	106.700.000	83.346.000	8.500.000	91.846.000	14.854.000
12	ALAT KESEHATAN UMUM	0	4.147.200	4.147.200	-	4.147.200	-
13	ALAT LABORATORIUM	8	1.911.457.302	1.262.251.011	92.552.456	1.354.803.467	556.653.835
14	ALAT PERSENJATAAN	0	22.755.000	22.755.000	-	22.755.000	-
15	KOMPUTER UNIT	5	1.029.357.887	699.840.134	64.805.253	764.645.387	264.712.500
16	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	455.000	455.000	-	455.000	-
B	GEDUNG DAN BANGUNAN		7.418.106.463	1.190.401.797	92.031.443	1.282.433.240	6.135.673.223
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	48	5.700.832.951	1.004.945.773	58.246.969	1.063.192.742	4.637.640.209
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	40	443.935.000	105.125.566	20.978.480	126.104.046	317.830.954
3	TUGU/TANDA BATAS	38	1.273.338.512	80.330.458	12.805.994	93.136.452	1.180.202.060
C	IRIGASI		30.503.000	5.908.760	393.527	6.302.287	24.200.713
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	45	10.000.000	1.100.000	100.000	1.200.000	8.800.000
2	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	5.600.000	1.679.997	93.333	1.773.330	3.826.670
3	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	30	6.176.000	1.165.191	91.106	1.256.297	4.919.703
4	BANGUNAN AIR KOTOR	30	8.727.000	1.963.572	109.088	2.072.660	6.654.340
D	JARINGAN		142.550.000	15.643.957	2.253.957	17.897.914	124.662.085
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	25	5.000.000	583.331	83.333	666.664	4.333.336
2	JARINGAN LISTRIK	42	101.450.000	9.520.626	1.268.124	10.788.750	90.661.250
3	JARINGAN TELEPON	38	36.100.000	5.540.000	902.500	6.442.500	29.657.500
E	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		91.525.000	-	-	91.525.000	-
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	91.525.000	-	-	91.525.000	-
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap			12.970.668.226			5.147.703.836	7.822.974.389
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			13.062.193.226			5.239.228.836	7.822.974.389

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Saifuddin Zuhri

NIP. 196406211994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Tanah

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.3 Persediaan

C.2 Aset Tetap

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017

- C.2.1 Tanah
- C.2.2 Peralatan dan Mesin
- C.2.3 Gedung dan Bangunan
- C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.2.5 Aset Tetap Lainnya
- C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.3 Aset Lainnya
 - C.3.1 Aset Tak Berwujud
 - C.3.2 Aset Lain-lain
 - C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017

- E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
- E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Saifuddin Zuhri

NIP. 196406211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.160.814.350,00 atau mencapai 146,34% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp793.248.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp7.533.466.272,00 atau mencapai 99,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.605.395.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.450.824.535,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp247.490.888,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.200.276.147,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.057.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.130.371,00 dan Rp10.051.189.505,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.145.629.465,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.111.935.688,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.966.306.223,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp35.539.825,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.930.766.398,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp11.696.595.138,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.930.766.398,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp4.282.348.952,00 dan ditambah Transaksi

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Antar Entitas sebesar Rp6.391.516.472,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp16.439.694.164,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	793.248.000,00	1.160.814.350,00	146,34	746.076.600,00
Jumlah Pendapatan		793.248.000,00	1.160.814.350,00	146,34	746.076.600,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2.924.728.000,00	2.917.177.586,00	99,74	2.870.295.191,00
Belanja Barang	B.3	3.517.815.000,00	3.462.790.223,00	98,44	3.623.920.684,00
Belanja Modal	B.4	1.162.852.000,00	1.153.498.463,00	99,20	2.446.019.000,00
Jumlah Belanja		7.605.395.000,00	7.533.466.272,00	99,05	8.940.234.875,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	21.400,00	1.316.285,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	2.048.610,00	2.048.610,00
Persediaan	C.1.3	245.420.878,00	82.290.870,00
Jumlah Aset Lancar		247.490.888,00	85.655.765,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	8.147.196.000,00	3.429.738.420,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.056.192.476,00	5.210.283.415,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.948.886.000,00	7.410.971.463,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	167.786.000,00	173.053.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	236.000.000,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-4.155.350.856,00	-3.627.978.818,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-179.819.100,00	-1.189.331.547,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-20.614.373,00	-21.552.717,00
Jumlah Aset Tetap		16.200.276.147,00	11.621.183.216,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	6.115.000,00	6.115.000,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Aset Lain-lain	C.3.2	0,00	384.538.428,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	0,00	-383.624.428,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-3.057.500,00	-1.528.750,00
Jumlah Aset Lainnya		3.057.500,00	5.500.250,00
Jumlah Aset		16.450.824.535,00	11.712.339.231,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	11.130.371,00	15.744.093,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.130.371,00	15.744.093,00
Jumlah Kewajiban		11.130.371,00	15.744.093,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	16.439.694.164,00	11.696.595.138,00
Jumlah Ekuitas		16.439.694.164,00	11.696.595.138,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		16.450.824.535,00	11.712.339.231,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.145.629.465,00	734.621.190,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.145.629.465,00	734.621.190,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.917.417.586,00	2.861.579.413,00
Beban Persediaan	D.3	276.977.386,00	255.748.698,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.585.187.498,00	1.861.970.752,00
Beban Pemeliharaan	D.5	569.232.895,00	441.466.511,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	904.837.089,00	1.157.535.516,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	858.283.234,00	733.799.399,00
JUMLAH BEBAN		7.111.935.688,00	7.312.100.289,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.966.306.223,00	-6.577.479.099,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	13.350.000,00	3.765.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	914.000,00	1.820.570,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	25.461.287,00	69.414.277,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	2.357.462,00	62.542.240,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		35.539.825,00	8.816.467,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.930.766.398,00	-6.568.662.632,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	10.051.189.505,00	10.310.175.633,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-5.930.766.398,00	-6.568.662.632,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00	-258.986.128,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	4.282.348.952,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6.391.516.472,00	8.229.997.775,00
EKUITAS AKHIR		14.794.288.531,00	11.712.524.648,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Comment [c2]: Tambahkan sesuai PER 42 2014

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, Mendukung terwujudnya keamanan pangan dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk :

Melaksanakan usaha pencegahan masuknya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dari luar negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia khususnya ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya;

Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantina nasional secara komprehensif,

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas perdagangan komoditi pertanian,

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaan.

Mendukung Upaya khusus peningkatan ketahanan pangan

Melalui peranan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaandiharapkan Penyelenggaraan karantina pertanian yang pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dapat terwujud atau mampu menghadapi serangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkomitmen dengan visi "Menjadi Instansi Pelayanan yang terbaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017".

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Landasan Yuridis yang dimaksud adalah :

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Lingkungan strategis

Perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas SDM birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dituntut untuk tidak diskrimanatif serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan Pembangunan Perkarantinaan

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan Barantan, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2010 – 2017, Visi Badan Karantina Pertanian adalah " Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya, dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan"

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya.

Mendukung terwujudnya ketahanan dan keamanan pangan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

Penguatan kelembagaan

Program kerja Penguatan Kelembagaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah berupa output terlaksananya pembangunan Kantor-kantor Wilker beserta Instalasi Karantinanya serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya khususnya untuk penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dan berkompeten guna mendukung efektifitas pencegahan dan pengendalian OPT/OPTK dan HPH/HPHK.

Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai .

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Mengikuti sertakan pegawai dalam pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.

Melatih dan meningkatkan pengetahuan petugas karantina hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan workshop maupun pelatihan teknis.

Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain.

Membekali buku saku tentang prosedur kerja 8P bagi para petugas POPT dan MV serta PMV dalam tugas perkarantinaaan pertanian maupun dalam melakukan pengawasan lalu lintas hayati.

Melatih dan membekali pengetahuan kepada para petugas POPT dan MV serta PMV tentang teknik/tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Pengembangan Kerjasama dengan instansi terkait dan Public Awareness

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Berpartisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, baik tingkat nasional maupun daerah,

Koordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan instansi terkait dengan system CIQ, dalam rangka pelaksanaan operasional,

Mengadakan sosialisasi perkarantina kepada masyarakat dan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan, perusahaan ekspor/impor dan instansi lainnya melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Pertanian.

Koordinasi dengan Administrator Pelabuhan dan Administrator Bandar Udara, serta Kantor Pos dalam rangka kegiatan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran,

Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dibidang karantina pertanian,

Koordinasi dengan asosiasi perusahaan pengendali OPT dalam rangka pelaksanaan skim audit fumigasi dan asosiasi lainnya.

Peningkatan penerapan Peraturan Perundangan dan Sistem Perkarantina, dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri, Juklak/Juknis, dan Manual). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian,

Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang – undangan karantina pertanian,

Melakukan sosialisasi peraturan perundangan/regulasi karantina pertanian,

Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Pengumpulan dan pengolahan data informasi publikasi dan dokumentasi,

Mengadakan bahan informasi dan publikasi, antara lain menerbitkan brosur, leaflet, film, dan buku tentang karantina pertanian.

Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer,

Menerapkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,

Pengadaan bahan komputer dan perlengkapan lainnya,

Pembuatan laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Pengembangan Infrastruktur. Sarana dan Prasarana yang optimal serta teknologi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Melengkapi sarana, peralatan, dan bahan operasional/pemeriksaan media pembawa OPTK dan HPHK di lapangan,

Melengkapi peralatan dan bahan laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya yang berkaitan dengan identifikasi OPTK/HPHK, teknis dan metode pengujian yang tepat dan akurat.

Melengkapi bahan dan peralatan perlakuan karantina pertanian,

Pemeliharaan gedung kantor dan instalansi karantina lainnya,

Pengadaan kendaraan operasional roda-2

Pemeliharaan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda-4 dan roda-2,

Pengadaan dan pemeliharaan alat pengolah data

Pengadaan dokumen operasional karantina yang tidak disediakan oleh Barantan.

Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Satker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendn Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .
- c. Penyusutan Aset Tetap
 - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	248.000,00	248.000,00
Pendapatan Jasa	793.000.000,00	793.000.000,00
Jumlah Pendapatan	793.248.000,00	793.248.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.538.655.000,00	2.924.728.000,00
Belanja Barang	3.454.282.000,00	3.517.815.000,00
Belanja Modal	1.000.628.000,00	1.162.852.000,00
Jumlah Belanja	6.993.565.000,00	7.605.395.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.160.814.350,00 atau mencapai 146,34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp793.248.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	248.000,00	13.350.000,00	5.383,07
Pendapatan Jasa	793.000.000,00	1.146.679.850,00	144,60
Pendapatan Lain-lain	0,00	784.500,00	0,00
Jumlah	793.248.000,00	1.160.814.350,00	146,34

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 55,59% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	13.350.000,00	3.765.000,00	254,58
Pendapatan Jasa	1.146.679.850,00	733.354.905,00	56,36
Pendapatan Lain-lain	784.500,00	8.956.695,00	-91,24
Jumlah	1.160.814.350,00	746.076.600,00	55,59

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp7.533.466.272,00 atau 99,05% dari anggaran belanja sebesar Rp7.605.395.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2.924.728.000,00	2.920.517.586,00	99,86
Belanja Barang	3.517.815.000,00	3.462.790.223,00	98,44
Belanja Modal	1.162.852.000,00	1.153.498.463,00	99,20
Total Belanja Kotor	7.605.395.000,00	7.536.806.272,00	99,10
Pengembalian Belanja		-3.340.000,00	0,00
Total Belanja	7.605.395.000,00	7.533.466.272,00	99,05

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -15,74% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Peningkatan Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai dari kantor pusat dan ada mutasi pegawai kantor ke tempat lain.

Belanja Barang untuk meningkatkan kegiatan operasional perkantoran guna memberikan pelayanan secara efisien dan efektif.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Belanja Modal adanya penambahan Alat-alat pengolahan data dan kendaraan operasional guna mendukung sarana dan prasarana kantor balai.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Pegawai	2.917.177.586,00	2.870.295.191,00	1,63
Belanja Barang	3.462.790.223,00	3.623.920.684,00	-4,45
Belanja Modal	1.153.498.463,00	2.446.019.000,00	-52,84
Total Belanja	7.533.466.272,00	8.940.234.875,00	-15,74

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.917.177.586,00 dan Rp2.870.295.191,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,63% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya perubahan tarif tunjangan fungsional veteriner dan POPT.

Adanya pegawai yang naik pangkat sebanyak 9 pegawai

Adanya pegawai yang kenaikan gaji berkala sebanyak 26 pegawai

Adanya penambahan tanggungan anggota keluarga baik menambah anak

Adanya mutasi pegawai kantor sebanyak 3 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.728.975.236,00	2.585.891.786,00	5,53
Belanja Lembur	191.542.350,00	285.139.000,00	-32,83
Jumlah Belanja Kotor	2.920.517.586,00	2.871.030.786,00	1,72
Pengembalian Belanja Pegawai	-3.340.000,00	-735.595,00	354,05
Jumlah Belanja	2.917.177.586,00	2.870.295.191,00	1,63

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.462.790.223,00 dan Rp3.623.920.684,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -4,45% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Walaupun mengalami penurunan Belanja barang operasional sangat meningkat guna mendukung kegiatan operasional perkantoran

Untuk Belanja barang persediaan kantor dilakukan secara optimal agar pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar.

Perbandingan Belanja Barang

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.033.019.200,00	876.421.734,00	17,87
Belanja Barang Non Operasional	168.400.477,00	237.772.919,00	-29,18
Belanja Barang Persediaan	398.679.019,00	241.498.750,00	65,09
Belanja Jasa	388.621.543,00	744.804.102,00	-47,82
Belanja Pemeliharaan	569.232.895,00	365.887.663,00	55,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	904.837.089,00	1.157.535.516,00	-21,83

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	3.462.790.223,00	3.623.920.684,00	-4,45
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.462.790.223,00	3.623.920.684,00	-4,45

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.153.498.463,00 dan Rp2.446.019.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar -52,84% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan antara lain adanya penambahan aset peralatan mesin berupa alat pengolahan data, AC standing serta kendaraan dinas roda 2.

Menurunnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan kantor dapat Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung

Perbandingan Belanja Modal

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	239.922.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	937.542.463,00	690.965.000,00	35,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.956.000,00	1.506.882.000,00	-85,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	8.250.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.153.498.463,00	2.446.019.000,00	-52,84
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.153.498.463,00	2.446.019.000,00	-52,84

B.4.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp937.542.463,00 dan Rp690.965.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 35,69% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh belanja modal peralatan mesin yang sesuai dengan kebutuhan operasional kantor yang sudah dianggarkan tahun 2017 untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan perkantoran.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	937.542.463,00	690.965.000,00	35,69
Jumlah Belanja Kotor	937.542.463,00	690.965.000,00	35,69
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	937.542.463,00	690.965.000,00	35,69

B.4.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp215.956.000,00 dan Rp1.506.882.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -85,67% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh kantor dapat realisasi jasan konsultansi dan Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.956.000,00	1.506.882.000,00	-85,67
Jumlah Belanja Kotor	215.956.000,00	1.506.882.000,00	-85,67
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	215.956.000,00	1.506.882.000,00	-85,67

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp21.400,00 dan Rp1.316.285,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Uang Tunai	21.400,00	1.316.285,00
Bank	0.00	0.00
dst...	0.00	0.00
Jumlah	21.400,00	1.316.285,00

C.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.048.610,00 dan Rp2.048.610,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sewa Tanah Pelindo	2.048.610,00	2.048.610,00
Penjelasan 2	0.00	0.00
dst...	0.00	0.00
Jumlah	2.048.610,00	2.048.610,00

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp245.420.878,00 dan Rp82.290.870,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	245.420.878,00	82.290.870,00
Jumlah	245.420.878,00	82.290.870,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.147.196.000,00 dan Rp3.429.738.420,00.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.056.192.476,00 dan Rp5.210.283.415,00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.948.886.000,00 dan Rp7.410.971.463,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp167.786.000,00 dan Rp173.053.000,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp236.000.000,00 dan Rp236.000.000,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-4.355.784.329,00 dan Rp-4.838.863.082,00.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6.056.192.476,00	-4.155.350.856,00	1.900.841.620,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.948.886.000,00	-179.819.100,00	5.769.066.900,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.786.000,00	-20.614.373,00	147.171.627,00
4.	Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		12.408.864.476,00	-4.355.784.329,00	8.053.080.147,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp384.538.428,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-3.057.500,00 dan Rp-385.153.178,00.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-3.057.500,00	3.057.500,00
	Akumulasi Penyusutan	6.115.000,00	-3.057.500,00	3.057.500,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.130.371,00 dan Rp15.744.093,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	720.000,00	480.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.410.371,00	15.264.093,00
Jumlah	11.130.371,00	15.744.093,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.051.189.505,00 dan Rp10.051.189.505,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.145.629.465,00 dan Rp734.621.190,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	244.500,00	0,00	0,00
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	1.145.384.965,00	734.621.190,00	55,92
Jumlah	1.145.629.465,00	734.621.190,00	55,95

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2017 dan 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada Semester II TA 2017 mengalami peningkatan sebesar 55,95 persen dari realisasi pendapatan dari PNBPN Semester II TA 2016.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.917.417.586,00 dan Rp2.917.417.586,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	1.848.737.900,00	1.742.313.542,00	6,11
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.564,00	28.806,00	2,63
Beban Tunj. Anak PNS	42.659.086,00	40.811.916,00	4,53
Beban Tunj. Beras PNS	117.682.500,00	116.306.520,00	1,18

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tunj. Fungsional PNS	195.060.000,00	181.110.000,00	7,70
Beban Tunj. PPh PNS	517.896,00	14.150.725,00	-96,34
Beban Tunj. Struktural PNS	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	137.681.290,00	130.469.904,00	5,53
Beban Tunjangan Umum PNS	34.005.000,00	39.015.000,00	-12,84
Beban Uang Lembur	191.542.350,00	285.139.000,00	-32,83
Beban Uang Makan PNS	317.652.000,00	280.384.000,00	13,29
Jumlah	2.917.417.586,00	2.861.579.413,00	1,95

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.917.417.586,- dan Rp 2.861.579.413,-. Berdasarkan Tabel diatas, realisasi belanja TA 2017 mengalami peningkatan sebesar kenaikan 1,95 persen dari realisasi belanja TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Untuk Menjaga Prov.Kepulauan Bangka Belitung, Pegawai BKP Kelas II Pangkalpinang dituntut untuk melindungi komoditas pertanian dari ancaman HPHK dan OPTK sehingga dilakukan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp276.977.386,00 dan Rp255.748.698,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	0,00	33.112.500,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	276.977.386,00	191.284.190,00	44,80
Beban persediaan lainnya	0,00	31.352.008,00	-100,00
Jumlah	276.977.386,00	255.748.698,00	8,30

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Beban Persediaan tersebut merupakan barang-barang yang habis pakai terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran yang efektif dan efisien

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.585.187.498,00 dan Rp1.861.970.752,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	136.642.093,00	217.472.926,00	-37,17
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.408.384,00	12.199.993,00	42,69
Beban Barang Operasional Lainnya	142.150.725,00	85.611.827,00	66,04
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	168.120.000,00	140.270.000,00	19,86
Beban Honor Output Kegiatan	14.350.000,00	8.100.000,00	77,16
Beban Jasa Konsultan	40.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	67.967.500,00	523.170.000,00	-87,01
Beban Jasa Profesi	50.200.000,00	24.155.000,00	107,83
Beban Keperluan Perkantoran	581.814.912,00	559.041.772,00	4,07
Beban Langganan Air	11.668.600,00	10.459.750,00	11,56
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.400.000,00	1.410.000,00	424,82
Beban Langganan Listrik	115.916.113,00	111.912.518,00	3,58
Beban Langganan Telepon	63.633.078,00	53.707.566,00	18,48
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	129.599.536,00	76.030.931,00	70,46

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.334.027,00	15.467.204,00	-26,72
Beban Sewa	26.982.530,00	22.961.265,00	17,51
Jumlah	1.585.187.498,00	1.861.970.752,00	-14,87

Berdasarkan tabel diatas, Beban barang dan jasa merupakan penyelenggaraan kegiatan operasional untuk mendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada publik/pengguna jasa semaksimal dan seefisien sesuai dengan SOP.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp569.232.895,00 dan Rp441.466.511,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.393.771,00	25.650.000,00	607,19
Beban Pemeliharaan Jaringan	7.363.112,00	2.862.244,00	157,25
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	330.569.012,00	337.375.419,00	-2,02
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.907.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	75.578.848,00	-100,00
Jumlah	569.232.895,00	441.466.511,00	28,94

Berdasarkan tabel diatas, beban pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perkantoran sebagai langkah strategis untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu dan handal dalam rencana kegiatan operasional kantor.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp904.837.089,00 dan Rp1.157.535.516,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	263.588.402,00	170.462.184,00	54,63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.670.000,00	161.250.000,00	-46,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	6.080.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	317.390.687,00	323.088.332,00	-1,76
Beban Perjalanan Tetap	237.188.000,00	496.655.000,00	-52,24
Jumlah	904.837.089,00	1.157.535.516,00	-21,83

Berdasarkan tabel diatas, Beban perjalanan dinas merupakan beban yg diperuntukan untuk pegawai mengelola anggaran yg diberikan untuk membina pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp858.283.234,00 dan Rp733.799.399,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	764.375,00	100,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	232.385.101,00	177.871.156,00	30,65
Beban Penyusutan Irigasi	856.027,00	792.225,00	8,05
Beban Penyusutan Jaringan	4.507.916,00	4.404.792,00	2,34
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	772.643,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	619.005.440,00	549.194.208,00	12,71
Jumlah	858.283.234,00	733.799.399,00	16,96

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-914.000,00	-1.820.570,00	-49,80
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-424.048,00	-62.542.240,00	-99,32
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-1.933.414,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0,00	4.936.695,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	24.921.287,00	60.457.582,00	-58,78
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	13.350.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	3.765.000,00	-100,00

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	540.000,00	4.020.000,00	-86,57
Jumlah	35.539.825,00	8.816.467,00	303,11

Berdasarkan tabel diatas, ini merupakan pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan senilai Rp. 24.921.287,- dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp.13.350.000,- serta adanya penerimaan kembali belanja pegawai tahun yang lalu senilai Rp. 540.000,-.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.051.189.505,00 dan Rp10.051.189.505,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-5.930.766.398,00 dan Rp-6.568.662.632,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.282.348.952,00 dan Rp-258.986.128,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-258.986.128,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.282.348.952,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
------------------	---------------

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	4.717.457.580,00
Gedung dan Bangunan	-1.678.041.463,00
Irigasi	-5.267.000,00
Jumlah	4.282.348.952,00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.391.516.472,00 dan Rp8.229.997.775,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.533.466.272,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.160.814.350,00
Transfer Keluar	-522.000,00
Transfer Masuk	19.386.550,00
Jumlah	6.391.516.472,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.160.814.350,00 sedangkan DKEL sebesar Rp7.533.466.272,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp19.386.550,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp19.386.550,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
----	-------	--------------	-------

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi		19.386.550,00
Jumlah			19.386.550,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-522.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi		-522.000,00
Jumlah			19.386.550,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.439.694.164,00 dan Rp11.696.595.138,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Di akhir tahun 2016 sewa tanah dari PELINDO Cabang Pangkalpinang pada Balai karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang terdapat Belanja dibayar di muka untuk periode per tanggal 1 januari sd 31 desember 2017 sebesar Rp.2.048.610,-
- b. Di pertengahan tahun dilakukan proses Rekonsiliasi dari bulan Januari sd Mei 2017 dengan KPPN Pangkalpinang sehingga masih terdapat selisih PNBPN dari bulan yang bersangkutan.
- c. Diakhir Bulan Juni terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Rehabilitasi Gedung pelayanan Wilker Bandara H.as.Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitung

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Tanah seluas 3,406 m² yang terletak di Jalan Jl Manggar Desa Buluh Tumbang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung yang merupakan Tanah ex wilker Karantina Hewan Palembang sedang dalam sengketa karena adanya kepemilikan ganda dengan pihak TNI AU Pangkalan Tanjung Pandan, dalam proses penyelesaiannya sudah di lakukan pertemuan dengan pihak –pihak terkait seperti penyediaan barang, kepala desa, pihak AU sendiri, BPN baik dengan BKP Kelas II Pangkalpinang maupun dengan Tim dari Badan Karantina Pertanian, yang terakhir pertemuan dengan Irjen dengan pihak TNI AU juga belum ada hasilnya juga masih menunggu kebijakan dari pihak kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Dan terakhir Proses penyelesaian sudah ada titik temu dengan Pihak AURI sehingga dari pihak BPN Tanjung pandan sudah mau melakukan proses pembuatan Sertifikat tanah yang bersangkutan.
- b. Pada Tahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 1 kali hal ini dikarenakan adanya penambahan Pagu DIPA dari Kantor Pusat sehingga berubahnya DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- c. Ditahun 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan inventarissasi aset rusak berat sehingga dilakukan proses lelang berdasarkan surat permohonan lelang Nomor:748/PL.320/K.30.C/5/2017 tanggal 30 Mei 2017 serta Salinan Risalah Lelang nomor:384/2017 untuk dilaksanakan proses lelang dengan perantara KPKNL Pangkalpinang berupa Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan Kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit.
- d. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : drh. Saifuddin Zuhri

Pejabat Pembuat Komitmen : drh. Saifuddin Zuhri

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2017

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Sunarto, SE

Bendahara : Agus Giarto, SP